

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang menjadikan desa sebagai unit pemerintahan terkecil. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa didefinisikan sebagai sebuah komunitas hukum yang memiliki batas-batas wilayah serta kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri. Kewenangan ini dijalankan berdasarkan inisiatif masyarakat, hak asal usul, serta hak-hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Riyanita, 2020). Desa sebagai unit terkecil dalam struktur pemerintahan memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan ini, pemerintah telah menginisiasi pembentukan Badan Usaha Milik Desa atau yang biasa disebut dengan BUMDesa.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) merupakan entitas ekonomi yang modalnya dimiliki sepenuhnya atau sebagian besar oleh desa, melalui penyertaan langsung yang bersumber dari kekayaan desa yang telah dipisahkan. Tujuan utamanya adalah untuk mengelola aset, menyediakan layanan jasa, serta menjalankan berbagai kegiatan usaha lainnya demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. sebagai salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan perekonomian disuatu desa. Pembangunan ekonomi lokal desa ini didasarkan oleh kebutuhan, potensi, kapasitas desa, dan penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa dengan tujuan akhirnya adalah meningkatkan taraf ekonomi masyarakat desa. (Sujana et al., 2014). BUMDesa yang sebagai Lembaga keuangan desa yang bergerak dibidang keuangan atau (Financial Business) untuk memenuhi kebutuhan usaha mikro yang dijalankan oleh stakeholder didesa. Maka BUMDesa wajib menyusun laporan keuangan seluruh unit usaha di BUMDesa secara akuntabel dan transparan. Selain itu, BUMDesa wajib menyampaikan laporan perkembangan dari badan usaha BUMDesa kepada asosiasi desa melalui rapat desa minimal dua kali dalam satu

tahun menurut status keuangan yang ada dan semua transaksi yang sudah dilakukan oleh pelapor selama satu periode pelaporan.

Secara keseluruhan, bentuk laporan keuangan BUMDesa tidak jauh berbeda dengan laporan keuangan pada umumnya. Laporan ini berfungsi untuk memberikan gambaran serta penjelasan mengenai aktivitas ekonomi BUMDesa dalam suatu periode tertentu. Umumnya, laporan tersebut mencakup neraca, laporan laba rugi, dan laporan perubahan modal. Dalam penyusunan laporan tahunan, penting untuk diingat bahwa berbagai pihak sangat bergantung pada informasi yang disajikan. Oleh sebab itu, isi laporan keuangan harus memberikan manfaat bagi para pengguna. Informasi akan berguna apabila mudah dipahami dan dapat dimanfaatkan oleh penggunanya. Kualitas laporan keuangan ditentukan oleh sejumlah kriteria dan unsur, termasuk relevansi, keandalan, keterbandingan, dan keterpahaman informasi yang disampaikan. (Sinarwati & Prayudi, 2021).

Di Provinsi Bali, jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pertumbuhan ini dipicu oleh kebijakan Pemerintah Provinsi Bali yang menargetkan agar setiap desa memiliki BUMDesa. Salah satu daerah dengan pertumbuhan BUMDesa yang cukup signifikan adalah Kabupaten Buleleng. Kabupaten ini terdiri atas 9 kecamatan dan 129 desa, di mana hampir seluruh desa telah memiliki BUMDesa. Informasi ini diperoleh dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng. Berikut adalah data mengenai BUMDesa yang ada di kabupaten Buleleng.

Tabel 1. 1 Data BUMDesa Se-Kabupaten Buleleng

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah BUMDesa
1.	Kubutambahan	13	13
2.	Tejakula	10	10
3.	Sawan	14	14
4.	Sukasada	13	13
5.	Buleleng	12	12
6.	Banjar	17	17
7.	Seririt	21	19
8.	Busungbiu	15	14
9.	Gerokgak	14	13
Total		129	125

Sumber: DPMD Kab.Buleleng (2024)

Menurut data DPMD Kabupaten Buleleng 2024, Banyak BUMDesa di Kabupaten Buleleng yang belum memiliki laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Hal ini menyulitkan pengawasan dan evaluasi, baik dari pihak internal desa maupun dari pemerintah daerah. Berdasarkan data dari DPMD Kabupaten Buleleng, banyak BUMDesa yang tidak mematuhi standar akuntansi yang berlaku, sehingga laporan keuangan tersebut yang disusun tidak dapat dipertanggungjawabkan secara tepat. Hal ini terlihat pada beberapa desa di Buleleng yang masih kesulitan dalam mengelola dan menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Masalah-masalah terkait kualitas keuangan BUMDesa di Kabupaten Buleleng sangat mempengaruhi efektivitas dan keberlanjutan operasional BUMDesa.

Dimana dikecamatan banjar memiliki banyak BUMDesa dan tetap pada tahun ke tahun, sehingga memungkinkan pengumpulan data yang lebih banyak dan variatif, serta meningkatkan validitas dan reliabilitas hasil penelitian. Dengan banyaknya BUMDesa di Kecamatan Banjar, penelitian ini dapat memperoleh gambaran yang lebih komprehensif tentang pengelolaan keuangan BUMDesa, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan BUMDesa.

Kecamatan Banjar terdiri dari 17 desa yang seluruhnya telah memiliki BUMDesa yang beroperasi secara aktif. Namun demikian, masih terdapat tantangan yang berkaitan dengan pemahaman akuntansi, penggunaan teknologi informasi, dan sistem pengendalian internal, yang dapat memengaruhi mutu laporan keuangan. Ketiga aspek tersebut saling berkaitan dan berperan penting dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan BUMDesa. Untuk mengatasi kendala ini, BUMDesa perlu memperhatikan berbagai faktor yang memengaruhinya, termasuk kemampuan sumber daya manusia. Salah satu penyebab permasalahan yang sering muncul adalah ketidaksesuaian data dalam laporan keuangan, seperti kesalahan pencatatan dan kurangnya ketelitian dari pihak pengelola. Akibatnya, laporan keuangan menjadi tidak seimbang. Selain itu, kesempatan pelatihan masih terbatas, terutama dalam hal sistem informasi akuntansi. Laporan keuangan dianggap berkualitas apabila mampu menyajikan informasi yang akurat dan jujur, sehingga dapat menjadi dasar yang andal bagi

para pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Hal ini sejalan dengan empat karakteristik kualitatif laporan keuangan sebagaimana diatur yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tahun 2010).

Salah satu faktor yang turut memengaruhi baik atau buruknya mutu laporan keuangan BUMDesa adalah tingkat pemahaman akuntansi. Permasalahan ini timbul karena sebagian besar pengelola BUMDesa belum memiliki latar belakang pendidikan di bidang akuntansi. Pengurus yang memahami akuntansi dengan baik akan lebih mampu menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang berkualitas. Mereka yang memiliki pengetahuan dan keahlian dalam bidang akuntansi dapat mencatat, mengklasifikasikan, serta mengolah data keuangan secara tepat, sehingga menghasilkan informasi keuangan yang akurat dan dapat dipercaya. Sebaliknya, rendahnya pemahaman akuntansi dapat berdampak negatif terhadap kualitas laporan keuangan, terutama dalam proses penyusunannya. Hal ini juga diperparah oleh belum optimalnya penerapan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan lemahnya fungsi pengawasan internal (internal audit).

Pemanfaatan teknologi informasi turut berperan dalam menentukan kualitas laporan keuangan BUMDesa. Di tengah perkembangan era digital saat ini, penerapan sistem informasi akuntansi berbasis komputer mampu meningkatkan ketepatan, kecepatan, dan efisiensi dalam proses penyusunan laporan keuangan (Romney & Steinbart, 2018). Namun, kenyataannya di lapangan menunjukkan bahwa banyak BUMDesa masih menggunakan metode pencatatan manual, serta kekurangan sumber daya manusia yang menguasai teknologi informasi. Hasil penelitian oleh Dewi et al. (2017) juga menunjukkan bahwa tingkat pemanfaatan teknologi informasi masih tergolong rendah. Optimalisasi penggunaan teknologi informasi dapat memperbaiki efisiensi dan efektivitas dalam menyusun laporan keuangan BUMDesa. Pemakaian aplikasi atau sistem akuntansi berbasis teknologi dapat membantu pencatatan, pengolahan, dan penyajian data keuangan secara digital, yang pada gilirannya mampu mengurangi kesalahan dan mempercepat penyampaian laporan.

Pemahaman akuntansi dan pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern juga memiliki peran penting dalam menjaga kualitas laporan

keuangan. Sistem pengendalian intern yang baik akan membantu BUMDesa dalam menjaga integritas laporan keuangan, mencegah terjadinya penyimpangan, serta memastikan bahwa seluruh transaksi keuangan tercatat dengan benar dan sesuai prosedur. Pada hasil wawancara sistem pengendalian intern yang ada di BUMDesa belum ada pemisahan tugas yang jelas, lemahnya sistem otoritas dan tidak adanya audit internal berkala. Sistem pengendalian intern yang memadai dapat menjamin keandalan informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan BUMDesa.

Pengendalian intern yang efektif, seperti adanya pemisahan tugas, otorisasi transaksi, dan verifikasi, dapat mengurangi risiko kesalahan atau penyimpangan dalam pencatatan dan pelaporan keuangan. Pengendalian intern yang efektif melibatkan berbagai mekanisme, seperti pemisahan tugas, otorisasi transaksi, dan audit internal, yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kecurangan atau kesalahan dalam pencatatan transaksi. Dalam konteks BUMDesa, penerapan sistem pengendalian intern seringkali masih lemah akibat keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran. Oleh karena itu, penguatan sistem pengendalian intern merupakan salah satu langkah strategis dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan BUMDesa. Sistem pengendalian intern merupakan upaya-upaya yang dilaksanakan pimpinan maupun semua karyawan guna menyakinkan semua pihak untuk mewujudkan tujuan organisasi (Mene et al., 2018)

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Ariska et al., 2023) tentang pengaruh teknologi informasi akuntansi, kompetensi dan pelatihan terhadap kualitas laporan keuangan BUMDesa di wilayah kecamatan Malangke Barat kabupaten luwu utara. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu peneliti menggunakan variabel independen yaitu pemahaman akuntansi, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern sementara penelitian sebelumnya berfokus pada teknologi informasi akuntansi, kompetensi dan pelatihan. Kemudian perbedaan lainnya yaitu objek penelitian ini adalah BUMDesa di Kecamatan Banjar, sementara penelitian sebelumnya melakukan

penelitian pada BUMDesa di wilayah Kecamatan Malangke Barat kabupaten luwu utara.

Fokus dalam penelitian ini diarahkan pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), mengingat lembaga pengkreditan desa dan koperasi masih tetap berjalan, meskipun menghadapi beberapa kendala yang umumnya dapat ditangani dengan baik. Pemilihan variabel penelitian didasarkan pada hasil observasi dan wawancara awal yang telah saya lakukan di BUMDesa Sari Sedana, Desa Sidetapa, dengan melibatkan Bapak I Made Tama selaku Ketua Forum BUMDesa Kecamatan Banjar sebagai partisipan. Dimana dalam menemukan kendala pada pemahaman akuntansi, yaitu dalam mayoritas pengelolaan BUMDesa masih banyak BUMDesa yang belum memiliki latar belakang Pendidikan akuntansi. Dalam pemanfaatan teknologi informasi masih banyak BUMDesa melakukan pencatatan secara manual dan minimnya SDM yang memahami teknologi informasi, dan juga dalam sistem pengendalian intern belum ada pemisahan tugas yang jelas, lemahnya sistem otoritas dan tidak adanya audit internal berkala. Pernyataan ini disampaikan secara langsung oleh pengurus BUMDesa, yang menyatakan bahwa kondisi tersebut dapat memengaruhi kualitas laporan keuangan yang disusun. Penelitian ini dilaksanakan di BUMDesa yang berada di wilayah Kecamatan Banjar, karena berdasarkan hasil observasi awal, ditemukan beberapa BUMDesa yang menghadapi permasalahan dalam penyusunan laporan keuangan mereka. Berikut ini merupakan sejumlah permasalahan yang ditemukan pada BUMDesa di Kecamatan Banjar.

Menurut laporan dari (www.wartabali.com), pada tahun 2019 ditemukan adanya penyimpangan dalam penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Tirtasari, Kecamatan Banjar. Akibat kejadian tersebut, sejumlah aparat desa termasuk Ketua BPD Tirtasari dipanggil oleh pihak berwenang untuk memberikan keterangan dan data terkait dugaan penyelewengan dana BUMDesa Sadu Amerta di desa tersebut. Masalah serupa tidak hanya terjadi di BUMDesa itu saja, tetapi juga dialami oleh beberapa BUMDesa lainnya. Salah satunya adalah BUMDesa Mekar Laba, yang diketahui tidak menyetorkan dana tabungan milik nasabah dan malah digunakan oleh oknum pengurus, dengan nilai penyalahgunaan yang mencapai ratusan juta rupiah

(<http://www.baliexpress.com/>). Dugaan penyalahgunaan dana di BUMDesa Sadu Amerta dan Mekar Laba menunjukkan adanya hubungan erat antara kualitas laporan keuangan dan transparansi pengelolaan keuangan. Laporan keuangan yang baik mencerminkan transparansi dan ketepatan dalam pencatatan seluruh transaksi, termasuk penggunaan anggaran sesuai ketentuan. Ketika terjadi penyimpangan dana, biasanya akan terlihat dari ketidaktepatan atau ketidakcocokan isi laporan keuangan dengan kondisi sebenarnya. Di samping itu, laporan keuangan yang tersusun dengan baik memungkinkan pihak terkait untuk melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja keuangan BUMDesa secara rutin, serta memastikan bahwa pengelolaan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, mutu laporan keuangan sangat penting untuk mendeteksi dan mencegah praktik penyelewengan, serta menjaga prinsip akuntabilitas dan integritas dalam pengelolaan keuangan BUMDesa. Dalam konteks ini, hasil wawancara dengan Bapak I Made Tama selaku Ketua BUMDesa Sari Sedana di Desa Sidetapa mengungkapkan bahwa masih ada pegawai BUMDesa yang merangkap jabatan, seperti bendahara yang juga membantu di bagian toko. Kondisi tersebut sering kali menyebabkan kesalahan dalam pencatatan. Bahkan, ketua BUMDesa sendiri terkadang turun tangan langsung dalam penyusunan laporan keuangan.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, penulis termotivasi untuk meneliti bagaimana pemahaman akuntansi, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian internal mempengaruhi permasalahan yang dihadapi BUMDesa dalam menyusun laporan keuangan yaitu **“Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (Studi Pada BUMDesa Kecamatan Banjar)”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian, dapat diidentifikasi sejumlah permasalahan yang dihadapi BUMDesa di Kabupaten Banjar, di antaranya sebagai berikut.

1. Pemahaman akuntansi pada pengelolaan BUMDesa yang terbatas karena masih banyak BUMDesa belum memiliki latar belakang

Pendidikan akuntansi sehingga berdampak pada kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

2. Pemanfaatan teknologi informasi masih kurang dikarenakan masih banyak BUMDesa melakukan pencatatan secara manual dan minimnya SDM yang memahami teknologi informasi
3. Belum menerapkan sistem pengendalian intern secara baik, yaitu belum ada pemisahan tugas yang jelas, lemahnya sistem otoritas dan tidak adanya audit internal berkala.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, untuk memperjelas pembahasan masalah penelitian secara terfokus, maka penelitian ini dibatasi pada masalah sebagai berikut:

1. Lingkup penelitian ini hanya informasi seputar Kualitas Laporan Keuangan BUMDesa di Kecamatan Banjar
2. Informasi yang disajikan diukur berdasarkan dari pengaruh pemahaman akuntansi, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern khususnya pada BUMDesa di Kecamatan Banjar.

1.4 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Apakah pemahaman akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan BUMDesa di Kecamatan Banjar?
- b. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan BUMDesa di Kecamatan Banjar?
- c. Apakah sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan BUMDesa di Kecamatan Banjar?

1.5 Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah yang telah dirumuskan, maka tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan BUMDesa di Kecamatan Banjar
2. Untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan BUMDesa di Kecamatan Banjar

3. Untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan BUMDesa di Kecamatan Banjar

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat, baik dari segi teoritis maupun praktik, sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk memperluas wawasan dan pemahaman teoritis mengenai kualitas laporan keuangan serta faktor-faktor yang memengaruhinya, khususnya dalam konteks BUMDesa. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, terutama pada mata kuliah yang berkaitan di bidang Ekonomi dan Akuntansi. Selain itu, penelitian ini juga dapat dijadikan referensi dalam memahami lebih mengenai aspek-aspek yang memengaruhi kualitas laporan keuangan.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi BUMDesa Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi BUMDesa terkait dampak dari pemahaman akuntansi, pemanfaatan teknologi informasi, serta sistem pengendalian internal terhadap mutu laporan keuangan mereka
2. Bagi Penulis Penelitian ini juga bermanfaat bagi penulis dalam memperluas pengetahuan dan pemahaman mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kualitas laporan keuangan, khususnya dalam hal pemahaman akuntansi, penerapan teknologi informasi, dan sistem pengendalian internal pada BUMDesa.
3. Bagi Pembaca, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian serupa di masa mendatang serta membantu memperdalam wawasan dalam bidang akuntansi, khususnya yang berkaitan dengan kualitas laporan keuangan.